

Perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Lampung (Model Tipologi Klassen)

¹ Ambya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung (Unila), Indonesia

Informasi Naskah

Submitted: 12 Oktober 2019

Revision: 1 November 2019

Accepted: 7 November 2019

Kata Kunci:

Ketimpangan, Perkembangan DOB, Tipologi Klassen

Abstract

Considerations of the district area to divide include, among others, the existence of group similarities (preference for homogeneity), and social ties in one ethnicity (historical ethnic) believed to be able to realize shared prosperity. This study aims to see the development of DOB, which is grouped with the Model criteria Klassen Typology. The variable used is the income per capita with the rate of economic growth of new autonomous regions compared to provinces. The results show that all DOB belong to the relatively disadvantaged regional groups, except in East Lampung Regency. The relatively young new autonomous regions cause this condition. Their potential has not been fully managed to the maximum due to the limitations of the region, especially regional finance.

Abstrak

Pertimbangan pembentukan DOB antara lain yaitu adanya kesamaan kelompok (*preference for homogeneity*), dan ikatan sosial dalam satu etnik (*historical ethnic*) yang diyakini dapat mewujudkan kesejahteraan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan DOB yang dikelompokkan dalam kriteria model Tipologi Klassen. Variabel yang di gunakan yaitu pendapatan perkapita dengan laju pertumbuhan ekonomi DOB dibandingkan dengan Provinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa semua DOB yang terbentuk, masuk pada kelompok daerah relative tertinggal, kecuali kabupaten Lampung timur. Kondisi ini disebabkan karena daerah otonom baru yang relative muda. Potensi yang dimiliki belum sepenuhnya di kelola dengan maksimal karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki daerah terutama keuangan daerah.

* *Corresponding Author.*

Ambya, e-mail: ambya.mahmud@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.23960/jep.v8i3.63>

PENDAHULUAN

Proses desentralisasi fiskal (1999) telah berdampak terhadap pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran kabupaten/kota atau propinsi dengan pertimbangan jumlah penduduk yang semakin banyak, wilayah yang sangat luas, karakteristik dan potensi ekonomi yang bervariasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah pada pasal 2 menyatakan bahwa tujuan pemekaran adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, pembangunan perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pengalaman pemekaran yang dilakukan di beberapa negara seperti Slovakia dan Hungaria menjadi isu perdebatan antara akademisi dan politisi. Fox dan Gurley (2005) menjelaskan bahwa setiap negara memiliki pertimbangan yang berbeda seperti latar belakang, tujuan dan motivasi politiknya. Pertimbangan utama adalah tersedianya biaya transisi yang cukup terhadap kegiatan pemerintahan yang baru. Pemekaran ini berbeda dengan pemekaran wilayah yang terjadi di Maroko dan Tunisia, dengan pertimbangan bahwa pada wilayah yang lebih kecil dan masyarakat yang homogen, pemerintah pusat dapat dengan mudah melakukan kontrol terhadap kebijakan yang dijalankan.

Secara teoretis, yang pertama mengungkapkan konsep pemekaran adalah Tiebout (1956), Ia menjelaskan bahwa pemekaran dianalogikan sebagai model ekonomi persaingan sempurna. Pemerintahan daerah memiliki kekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak yang dikehendaki untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara efisien. Pemerintah memiliki kewenangan mengizinkan setiap individu masyarakat untuk mengekspresikan preferensinya pada setiap jenis pelayanan dari berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda.

Pemekaran di Indonesia dapat berupa satu provinsi yang dimekarkan menjadi dua provinsi atau lebih. Hal yang sama dapat dilakukan pada level kabupaten/kota yaitu pemekaran satu kabupaten/kota menjadi dua kabupaten/kota atau lebih. Pemekaran kabupaten/kota atau pembentukan DOB menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada saat ini, pemekaran kabupaten/ kota harus merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Dalam peraturan tersebut, pembentukan kabupaten/ kota harus memenuhi tiga syarat yaitu administrasi, teknis, dan fisik. Syarat administrasi meliputi persetujuan DPRD kabupaten/kota, bupati/walikota induk, DPRD Provinsi, Gubernur serta rekomendasi Mendagri. Syarat teknis meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan. Syarat cakupan wilayah untuk pembentukan kabupaten minimal lima kecamatan, dan pembentukan kota minimal empat kecamatan. Faktor-faktor tersebut dinilai dalam suatu studi kelayakan yang mendalam dan menghasilkan satu rekomendasi bahwa suatu daerah layak dimekarkan atau tidak.

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah (DOB) dapat diukur dengan pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Upaya meningkatkan PDRB dapat dilakukan dengan memperbanyak kegiatan pembangunan sektor ekonomi. Kegiatan pembangunan daerah ditentukan oleh kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proporsi belanja pemerintah daerah merupakan komitmen seorang kepala daerah terhadap pembangunan sekaligus sebagai upaya memenuhi janji kampanyenya pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

Dampak dari belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada dasarnya, PDRB adalah

jumlah keseluruhan dari nilai tambah (value added) yang dihasilkan sebagai akibat adanya aktivitas ekonomi. PDRB dapat dijadikan tolak ukur bagi pemerintah dan pihak-pihak lain untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi, dan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi daerah secara keseluruhan atau per sektor. PDRB atas dasar harga konstan (constant price) memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi daerah secara riil, sedangkan PDRB atas dasar harga yang berlaku (at current price) memberikan gambaran tentang kontribusi atau pangsa dari setiap sektor dalam struktur perekonomian daerah sekaligus dapat digunakan untuk menyusun prioritas kebijakan pembangunan.

Tarigan (2010) menjelaskan bahwa pertimbangan daerah kabupaten melakukan pemekaran antara lain yaitu adanya kesamaan kelompok (preference for homogeneity), dan ikatan sosial dalam satu etnik (historical ethnic) yang diyakini dapat mewujudkan kesejahteraan bersama. Pertimbangan lain ialah adanya insentif fiskal (fiscal spoil) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana transfer pusat. Dana-dana dari pemerintah pusat menumbuhkan keyakinan bahwa pelaksanaan pemerintahan dapat dibiayai.

Jaminan tersebut diharapkan juga berdampak terhadap meningkatnya aktivitas perekonomian, baik melalui belanja langsung pegawai maupun belanja barang dan jasa. Pertimbangan lain ialah aspek politik, yaitu dengan adanya DOB akan muncul wilayah kekuasaan politik baru sehingga aspirasi politik masyarakat semakin terwadahi. Adanya penyebaran wilayah administratif (administrative dispersion) dapat mengatasi rentang kendali pemerintahan mengingat daerah-daerah yang dimekarkan memiliki wilayah yang luas sehingga pelayanan kepada masyarakat mudah dijangkau.

Studi Bappenas yang bekerjasama dengan UNDP tahun 2008 pada Daerah Otonom Baru (DOB) yang terbentuk tahun 2000-2005 secara umum menyimpulkan perkembangan pembangunan yang relatif kurang baik dibandingkan daerah induknya; perkembangan pembangunan ekonomi relatif lebih kecil dibandingkan wilayah induknya; tingkat kesejahteraan yang diukur dengan PDRB per kapita masih ketinggalan dibandingkan daerah induk. Sementara itu, pada aspek pelayanan publik, khususnya pendidikan menunjukkan bahwa DOB belum berkembang. Kondisi ini dilihat dari ketersediaan pendidik tingkat menengah dan infrastruktur pendukung. Kondisi yang sama juga terjadi pada kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Pelayanan publik yang diukur dari ketersediaan dan kualitas jalan yang ada pada DOB memiliki lebih rendah dibandingkan daerah induknya.

Studi tersebut menegaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di DOB lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di daerah induk. Secara umum pertumbuhan ekonomi daerah induk lebih stabil dengan kisaran 5-6% per tahun, sedangkan pertumbuhan ekonomi di daerah otonom baru lebih bervariasi. Faktor lain yang menjadi penentu keberhasilan tersebut adalah belanja investasi dimana rasio belanja modal pemerintah terhadap total belanja (Capital Expenditure) yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kebijakan pemerintah dalam penganggaran berorientasi kepada manfaat jangka panjang atau investasi. Studi yang dilakukan Bappenas juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap alokasi anggaran pemerintah pusat. APBD Pemerintah provinsi menghabiskan antara 70–80 persen APBD bersumber dari pusat, sedangkan kabupaten/kota 80–90 persen APBD bersumber dari pemerintah pusat.

DOB yang dibentuk di Provinsi Lampung pada tahun 1999 meliputi 3 kabupaten dan 1 kota. Sampai saat ini (2011) DOB tersebut telah berusia 10 tahun. Pada usia tersebut sebagian DOB memiliki pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil. Kegiatan pembangunannya sebagian besar dibiayai melalui dana pusat dalam bentuk Dana Perimbangan (daper). Secara umum pada awal dibentuknya DOB sumber pendapatan daerah didominasi oleh dana perimbangan. Selama sepuluh tahun dana perimbangan untuk kabupaten rata-rata 89,73 persen. Data ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di DOB masih tergantung dari pemerintah pusat.

Setiap daerah memiliki sektor basis yang berbeda-beda sesuai dengan potensi daerah yang dimilikinya. Identifikasi sektor basis dapat dilakukan dengan mengelompokkan daerah menjadi beberapa tipologi. Tipologi DOB ditentukan berdasarkan kemampuan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Sektor basis di setiap tipologi DOB merupakan keunggulan daerah sekaligus merupakan daya saing daerah.

Bagian ini berisi: (1) pentingnya penelitian yang dilakukan; (2) penjelasan tentang objek dan ruang lingkup studi; (3) menyajikan literatur terbaru terkait dengan topik yang diteliti; (4) menganalisis kekuatan & kelemahan publikasi sebelumnya; (5) menyampaikan prinsip-prinsip hasil penelitian atau keadaan terkini, dan (6) menyampaikan tujuan dan kebaruan penelitian; keadaan seni dan tujuan harus dihubungkan dengan jelas.

Daya Saing Ekonomi DOB

Menurut Glasson (1974), konsep dasar teori basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor, yaitu sektor basis dan non-basis. Sektor basis adalah sektor yang memiliki kemampuan mengeksport barang dan jasa ke luar daerah atau memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang ke daerah tersebut. Sektor non-basis adalah sektor yang hanya mampu menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat daerah yang bersangkutan. Bendavid (1991) mengatakan studi basis dilakukan untuk menemukan sumber utama (basic) yang merupakan basis ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah sebagian besar ditentukan oleh sektor dasar (basic sector).

Daya saing daerah merupakan suatu strategi yang potensial untuk diterapkan di DOB tertinggal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini tidak dapat berdiri sendiri karena lebih bersifat supply-side. Sisi demand side kurang diperhatikan karenanya usulan untuk membangun melalui kerjasama antar daerah dapat meningkatkan daya saing DOB tertinggal. Upaya menciptakan daya saing, menurut Porter (1985), dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari tiga strategi yaitu strategi cost leadership, differentiation, dan focus (secara umum semuanya dikenal dengan nama competitive strategy). Strategi pertama merebut pasar dengan harga murah melalui pengurangan biaya produksi; strategi kedua memanfaatkan kekhasan model atau menciptakan kualitas terbaik; dan strategi ketiga menggunakan kombinasi dari strategi pertama dan kedua. Pengadopsian pemikiran Porter, dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keunggulan DOB, yaitu dengan menekan biaya, meningkatkan kualitas produk dan jasa, dan mempertahankan segmen pasar. Asumsi pemikiran ini yakni DOB tertinggal harus aktif dan proaktif. Thompson & Perry, (2006) dan Agranoff (1966) mengemukakan bahwa kerjasama antardaerah dapat diperhitungkan sebagai alternatif meningkatkan daya saing daerah termasuk DOB.

Henry (1995) mengemukakan bentuk dan metode kerjasama antar pemerintah daerah meliputi (1) intergovernmental service contract; yaitu pembentukan kerjasama apabila suatu daerah membayar daerah yang lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti penjara, pembuangan sampah, kontrol hewan atau ternak, (2) joint service agreement, dilakukan untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang terlibat, misalnya dalam pengaturan perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi dan pemadam kebakaran, kontrol kebakaran, pembuangan sampah, (3) intergovernmental service transfer yaitu merupakan transfer permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan umum, prasarana dan sarana, kesehatan dan kesejahteraan, pemerintahan dan keuangan publik.

Menurut Agranoff (1996), pengaturan kerjasama antar pemerintah daerah dapat dilakukan dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Kerjasama (cooperation) antara pemerintah daerah telah lama dikenal dan dirasakan manfaatnya sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan (Patterson, 2008; Rosen, 1993). Keuntungan kerjasama semacam ini adalah dapat tercapainya skala ekonomi (economies of scales). Pembelian atau pembelian bersama dalam skala besar akan lebih menguntungkan daripada skala kecil.

Pembangunan Ekonomi Daerah

Sejak pelaksanaan otonomi daerah (1999), terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola otonomi daerah. Hal ini membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah. Implikasi di bidang ekonomi yaitu terwujudnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan antardaerah, dan upaya pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Menurut Bendavid-Val (1991),

pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah dalam menentukan sektor-sektor basis yang mampu mendorong ekonomi daerah, sedangkan sektor non-basic hanya merupakan sektor pen-dukung, misalnya perdagangan dan jasa-jasa.

Samuelson dan Nordhaus (2005) menyebutkan bahwa ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pembentukan modal, dan teknologi. Peran pengeluaran pemerintah dalam pembentukan modal yaitu melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang, seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana menjadi social overhead capital (SOC) yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik. Tanpa adanya fasilitas publik ini, pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya. Adanya berbagai fasilitas publik akan mendorong perekonomian daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Glasson (1974), menyatakan bahwa teori pertumbuhan regional jangka panjang harus memper-hitungkan mobilitas faktor-faktor produksi terutama tenaga kerja dan modal. Pada umumnya orang sependapat bahwa pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari faktor endogen atau eksogen, yakni faktor-faktor yang terdapat pada daerah yang bersangkutan ataupun dari luar daerah atau kombinasi dari keduanya. Faktor dari dalam daerah meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja dan modal, sedangkan faktor dari luar daerah yang penting adalah tingkat permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini fokus pada analisis ekonomi daerah dan perkembangan daerah pada sektor ekonomi basis (unggulan). Model analisis akan dilakukan dengan empat tahap. Secara berturut-turut model analisis pada masing-masing tahapan yaitu Analisis Tipologi Klassen, Model Location Quotion (LQ), dan Model Shift-Share. Secara rinci masing-masing model analisis diformulasikan sebagai berikut.

Model Tipologi Klassen

Model Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui karakteristik DOB berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Metode ini digunakan untuk menentukan berapa jumlah DOB untuk masing-masing tipologi. Klasifikasi DOB dibagi menjadi empat tipologi yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income), daerah maju tetapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income), dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income). Klasifikasi tipologi daerah secara jelas disajikan pada Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1.
Tipologi Daerah Otonom Baru

PDRB/kapita (y)	(y_i > y)	(y_i < y)
Laju Pertumbuhan (r)		
(r_i > r)	Tipe I Daerah CepatMaju dan cepat tumbuh	Tipe II Berkembang
(r_i < r)	Tipe III Daerah MajuTertekan	Tipe IV Daerah Relatif tertinggal

Keterangan: r : Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota (DOB)

y : Rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota (DOB)

r_i : Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota (DOB) yang diamati

y_i : PDRB per kapita kabupaten/kota (DOB) yang diamati

Analisis Location Quotion (LQ)

Mengacu A. Bendavid (1991) LQ adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur perbandingan relative sumbangan nilai tambah suatu sektor ekonomi daerah (DOB) terhadap nilai tambah sektor yang sama pada tingkat nasional. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi yang digolongkan menjadi dua yaitu sektor basis dan non-basis. Identifikasi dan penentuan sektor basis pada DOB digunakan model LQ. Model ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di DOB dengan sektor yang sama di tingkat nasional. Data yang digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan Produk Nasional Bruto (PNB) diformulasi sebagai berikut:

$$LQ = \frac{X_{ij}/X_j}{N_{in}/N}$$

Keterangan:

- LQ = Location Quotient
- X_{IJ} = PDRB Sektori DOBJ
- X_j = PDRB Total di DOBJ
- N_{in} = PNB sektor i Nasional
- N = PNB

Kriteria perhitungan LQ yang digunakan yaitu: Jika LQ > 1 berarti merupakan sektor basis dan merupakan sektor unggulan. Jika LQ < 1 berarti bukan sektor basis dan bukan sektor unggulan. Jika LQ = 1 berarti tingkat spesialisasi DOB sama dengan Nasional

Model Analisis Shift and Share

Menurut Glasson (1974) analisis ini digunakan untuk menentukan kinerja/produktifitas, pergeseran struktur dan posisi relatif sektor ekonomi, identifikasi sektor ekonomi potensial, dibandingkan dengan nasional.

Pengembangan sektor ekonomi potensial adalah upaya meningkatkan kondisi yang ada pada sektor-sektor ekonomi potensial untuk meningkatkan PDRB secara umum. Komponen share adalah pertambahan PDRB suatu daerah jika pertambahannya sama dengan pertambahan PDRB secara nasional selama periode waktu tertentu. Komponen net shift adalah komponen nilai untuk menunjukkan penyimpangan dari komponen share (N_j) dalam suatu daerah. Komponen differential shift adalah komponen untuk mengukur besarnya shift netto yang digunakan oleh sektor tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah tersebut di bandingkan dengan nasional. Sedangkan komponen proporsional shift adalah komponen yang digunakan untuk menghasilkan besarnya shift netto sebagai akibat dari PDRB daerah yang bersangkutan berubah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut: (1) Daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih besar dibanding rata-rata Provinsi Lampung; (2) Daerah maju tapi tertekan, daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih besar, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih kecil dibanding rata-rata Provinsi Lampung; (3) Daerah berkembang Cepat, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan besar, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih kecil dibanding rata-rata Provinsi Lampung; (4) Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapat per kapita yang lebih kecil dibanding rata-rata Provinsi Lampung. Dikatakan "besar" apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih besar dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan digolongkan "kecil" apabila indikator di suatu daerah lebih kecil dibandingkan rata-

rata seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Perkembangan PDRB per kapita untuk tiap kabupaten/kota selama tahun 2007-2011 dapat dijelaskan bahwa ada dua Kabupaten dan satu kota yang memiliki PDRB per-kapita yang lebih besar dari PDRB per-kapita provinsi Lampung. Kabupaten dan Kota tersebut adalah Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Bandar Lampung. Sedangkan kabupaten dan kota yang memiliki PDRB per-kapita yang lebih kecil dari PDRB per-kapita Provinsi Lampung tetapi mendekati Provinsi yaitu Lampung tengah dan Pesawaran. Perkembangan PDRB per kapita untuk tiap kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 2007-2011, beserta rata-ratanya untuk seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung, terlihat pada Tabel 2

Perkembangan pertumbuhan ekonomi tanpa migas di masing-masing kabupaten dan kota selama tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung dan Lampung Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi yaitu mencapai masing-masing 6,53% dan 6,26%. Kabupaten yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih besar dari rata-rata Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara yaitu 5,90 % dan 5,89% sedangkan rata-rata provinsi mencapai 5,89%. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2007-2011 (persen) dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2.

PDRB per Kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2007-2011 (juta rupiah)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
Lampung Barat	4.66	5.50	6.15	6.74	7.98	6.21
Tanggamus	9.29	11.21	7.92	8.89	10.29	9.52
Lampung selatan	7.23	8.46	9.88	11.19	12.20	9.79
Lampung Timur	7.68	8.70	9.48	11.06	12.41	9.87
Lampung Tengah	8.07	9.65	11.75	14.22	16.36	12.01
Lampung Utara	8.51	9.69	11.40	13.95	17.68	12.25
Way Kanan	4.95	5.53	6.32	7.39	8.43	6.52
Tulang Bawang	21.44	26.88	12.23	14.27	16.16	18.20
Pesawaran	7.20	8.59	10.45	12.87	15.00	10.82
Pringsewu	0.00	6.22	6.97	8.11	8.97	6.05
Tulang B. Barat	0.00	0.00	10.47	12.84	15.66	7.79
Mesuji	0.00	0.00	14.07	15.70	17.09	9.37
Bandar Lampung	12.49	15.92	19.63	22.04	25.03	19.02
Metro	5.56	6.28	7.16	8.03	8.98	7.20
Provinsi	8.29	9.91	11.82	14.24	16.70	12.19

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2012

Tabel 3.

Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2007-2011 (persen)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
Lampung Barat	5.82	5.15	5.64	5.72	4.54	5.37
Tanggamus	7.72	8.96	-34.38	5.79	6.41	-1.10
Lampung Selatan	6.48	5.09	5.28	5.71	6.03	5.72
Lampung Timur	6.18	5.92	6.29	6.36	6.55	6.26
Lampung Tengah	6.20	5.66	5.94	5.88	5.75	5.89
Lampung Utara	6.27	5.69	6.32	4.98	6.23	5.90
Way Kanan	5.52	4.60	5.04	5.17	5.49	5.16
Tulang Bawang	6.93	6.79	-51.13	6.19	5.50	-5.14
Pesawaran	5.88	5.34	5.69	5.91	6.41	5.85
Pringsewu	0.00	0.00	5.80	6.95	7.10	3.97

Tulang B.Barat	0.00	0.00	0.00	5.89	6.36	2.45
Mesuji	0.00	0.00	0.00	5.92	6.13	2.41
Bandar Lampung	6.83	6.93	6.01	6.33	6.53	6.53
Metro	6.24	5.21	5.32	5.89	6.40	5.81
Provinsi Lampung	6.14	5.42	5.52	5.99	6.40	5.89

Sumber: BPS Prov. Lampung, 2012

Berdasarkan data pada Tabel 2 dan 3 di atas, dapat digunakan untuk membagi kabupaten/kota di Provinsi Lampung menjadi 4 klasifikasi sesuai dengan Tipologi Klassen. Daerah yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh meliputi Kabupaten Lampung Utara dan Kota Bandar Lampung. Daerah dalam klasifikasi daerah maju tetapi tertekan adalah Kabupaten Tulang Bawang. Daerah dalam klasifikasi daerah berkembang cepat meliputi Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur. Sedangkan kabupaten Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung selatan, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Barat dan Kota Metro masuk dalam klasifikasi daerah relative tertinggal. Klasifikasi Kab/Kota Provinsi Lampung Menurut Tipologi Klassen disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4.

Klasifikasi Kab/Kota Provinsi Lampung Menurut Tipologi Klassen, 2007-2011

PDRB perkapita (y_i) Pertumbuhan Ekonomi (r_i)	($y_i > y$)	($y_i < y$)
($r_i > r$)	Daerah Cepat Maju Cepat Tumbuh: Bandar Lampung Lampung Utara	Daerah Berkembang Lampung Tengah Lampung Timur
($r_i < r$)	Daerah Maju Tertekan: Tulang Bawang	Daerah Relatif Tertinggal: Metro Tanggamus Pringsewu Pesawaran Lampung selatan Way Kanan Tulang Bawang Barat Mesuji Lampung Barat

Potensi Ekonomi Provinsi Lampung

Secara umum kegiatan ekonomi Provinsi Lampung dibagi menjadi sembilan sektor, yaitu:

1. Sektor Pertanian, yang terdiri dari:
 - a. Subsektor tanaman pangan; pembangunan pada subsektor ini diarahkan pada peningkatan produksi tanaman padi dan palawija dalam rangka mempertahankan swasembada pangan.
 - b. Subsektor tanaman per-kebunan; pembangunan pada subsektor ini diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi tanaman perkebunan terutama yang mudah di pasarkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan devisa negara dari hasil ekspor.
 - c. Subsektor peternakan dan hasilnya; pembangunan pada subsektor ini diarahkan pada peningkatan produksi daging, telur dan susu untuk memenuhi gizi masyarakat.
 - d. Subsektor kehutanan; kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan kayu, pengambilan hasil-hasil hutan dan perburuan binatang liar.
 - e. Subsektor perikanan; pembangunan pada subsektor ini diarahkan untuk peningkatan produksi dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat.
2. Sektor Pertambangan dan Galian
 - a. Subsektor tanpa migas, meliputi pengambilan dan persiapan pengolahan lanjutan

- benda padat, baik dibawah maupun pada permukaan bumi serta seluruh kegiatan lainnya yang bertujuan mendapatkan biji logam dan hasil tambang lainnya.
- b. Subsektor penggalian, ini mencakup penggalian dan dan penganblian segala jenis barang galian batu-batuan, pasir besi, biji perak serta komoditas tambang selain kegiatan yang mencakup yaitu penggalian batu-batuan, pasir, tanah, batu gunung, batu kali, batu kapur, batu koral, krikil, dan batu marmer.
3. Sektor Industri Pengolahan
Pembangunan pada bidang ini terutama diarahkan untuk industri pengolahan hasil pertanian, pemanfaatan limbah pertanian, industri rumah tangga, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Penekanan pembangunan pada industri, selain untuk meningkatkan produksi tapi juga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.
 4. Sektor Listrik, gas dan air minum, terdiri dari:
 - a) Subsektor listrik meliputi pembangunan dan penyaluran tenaga listrik yang diselenggarakan oleh PLN maupun non PLN. Yang dimaksud non PLN adalah perusahaan listrik yang dilakukan oleh perusahaan swasta atau peseorangan
 - b) Subsektor air minum; kegiatan ini meliputi proses pembersihan, pemurnian dan proses kimia lain untuk menghasilkan air minum termasuk penyaluran melalui pipa baik pada rumah tangga, instansi pemerintah maupun swasta.
 5. Sektor Bangunan
Kegiatan ini meliputi usaha pembangunan atau pembuatan, perluasan, perbaikan berat dan ringan, perombakan bangunan tempat tinggal, jalan, jembatan bendungan, jaringan listrik, telekomunikasi dan konstruksi.
 6. Sektor perdagangan, Hotel dan Restoran yang terdiri dari:
 - a. Subsektor perdagangan besar dan eceran; subsektor perdagangan memainkan peranan penting dalam perekonomian Provinsi Lampung, karena mendorong pertumbuhan dan produksi. Perdagangan mampu menjamin kelancaran pemasaran dan pembelian jasa dari konsumen ke produsen.
 - b. Subsektor perhotelan, kegiatan ini meliputi penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau keseluruhan bangunan berupa tempat penginapan, baik yang terbuka untuk umum atau hanya sebagian anggota suatu organisasi tertentu. Termasuk pula aktifitas penyediaan makanan dan minuman serta pentediaan fasilitas lainnya bagi para tamu penginapan, yang seluruh kegiatan tersebut berada dalam suatu kesatuan manajemen penginapan.
 - c. Subsektor restoran; kegiatan ini mencakup usaha penjualan untuk penyediaan makan dan minuman, yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan, di suatu tempat sendiri atau pun dijajakan.
 7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, yang terdiri dari;
 - a. Subsektor angkutan darat, meliputi angkutan jalan raya, jasa penunjang angkutan darat seperti parker dan terminal. Akan tetapi yang termasuk dalam perhitungan hanya terbatas pada segala jenis angkutan jalan raya seperti bus, truk, becak dan oplet.
 - b. Subsektor angkutan laut, meliputi kegiatan pelayanan angkutan, pelayanan samudra, perairan pantai, sungai dan jasa penumpang angkutan laut, namun yang termasuk dalam penghitungan terbatas pada angkutan perairan pantai saja.
 - c. Subsektor komunikasi; meliputi jasa komunikasi untuk umum seperti pengiriman surat, paket dan weselyang diusahakan oleh Perum Pos dan Giro, pengiriman berita dengan menggunakan telepon, telex, dan telegram yang diusahakan oleh Perum Telekomunikasi.
 8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, yang terdiri dari:
 - a. Subsektor keuangan (Bank), kegiatan ini meliputi jasa pelayanan di bidang keuangan kepada pihak lain, seperti menerima simpanan dalam bentuk giro dan tabungan, memberi pinjaman, mengirim uang, memindahkan rekening koran, membeli atau menjual surat-surat berharga dan memberi jaminan bank.

- b. Subsektor keuangan non bank, meliputi pelayanan asuransi baik jiwa atau pun bukan jiwa seperti asuransi kebakaran, kecelakaan, kerusakan dan sebagainya, termasuk juga agen perasuransian, unit penyaluran dana pensiun dan sebagainya.
 - c. Sektor persewaan dan jasa perusahaan, meliputi kegiatan pemberian jasa pada pihak lain seperti jasa hukum, jasa angkutan, jasa periklanan, jasa penyewaan mesin dan peralatan, jasa bangunan dan jasa arsitek. Tetapi yang termasuk dalam perhitungan terbatas pada jasa hukum (advokat/pengacara), notaris dan jasa konsultan.
9. Sektor Jasa, terdiri dari:
- a. Pemerintahan umum, meliputi jasa pelayanan sosial seperti rumah sakit umum dan panti asuhan.
 - b. Swasta, meliputi:
 - 1) Subsektor jasa sosial kemasyarakatan, meliputi jasa pendidikan dan pendidikan swasta mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, termasuk guru perorangan yang berusaha sendiri dan kursus-kursus, jasa kesehatan mencakup segala lembaga kesehatan swasta yang berbentuk rumah sakit maupun poliklinik, jasa sosial lainnya mencakup panti asuhan, rumah ibadah dan sebagainya.
 - 2) Subsektor kebudayaan dan hiburan, meliputi segala macam perusahaan dan lembaga swasta yang bergerak pada jasa hiburan, rekreasi serta kebudayaan seperti pembuatan dan distribusi film, usaha penyiaran film dan penyiaran radio swasta. Dari kegiatan tersebut di atas, yang termasuk dalam penghitungan terbatas pada kegiatan pemutaran film dan penyiaran radio swasta niaga.
 - 3) Subsektor perorangan dan rumah tangga, meliputi jasa yang diberikan untuk perorangan dan rumah tangga seperti jasa reparasi, jasa binatu, tukang cukur, tukang jahit, tukang las dan jasa perorangan lainnya..

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perkembangan Daerah Otonom Baru di Provinsi Lampung yang dikelompokkan dalam empat klasifikasi sebagai berikut yaitu: Daerah yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh meliputi Kabupaten Lampung Utara dan Kota Bandar Lampung. Daerah dalam klasifikasi daerah maju tetapi tertekan adalah Kabupaten Tulang Bawang. Daerah dalam klasifikasi daerah berkembang meliputi Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur. Sedangkan kabupaten Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung selatan, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Barat dan Kota Metro masuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal.
2. Daerah dengan kriteria cepat maju dan cepat tumbuh daerah tersebut memiliki keunggulan potensi yang di kembangkan antara sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor jasa, Sektor perdagangan, Hotel dan Restoran. Daerah Berkembang ternyata merupakan daerah lampung tengah lama Kab Induk bersama Kabupaten Lampung timur daerah ini masih mengandalkan sector pertanian, sedikit didukung sector keuangan dan jasa. Sedangkan daerah, maju tapi tertekan yaitu Kabupaten Tunlang bawang merupakan daerah baru daru lampung utara yang masih mengandalkan sector pertanian.
3. Khusus daerah dengan klasifikasi relative tertinggal, merupakan daerah otonom baru yang relative muda. Potensi yang dimiliki belum sepenuhnya di kelola dengan maksimal dikarenakan kemampuan daerah sangat terbatas, terutama keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesoye A.B., Olukayo, E.M. and Akinwande,A.A. (2010). Dynamic Analysis of Government Spending and Economic Growth in Nigeria, *Journal of Management and Society*, Vol. 1, No. 2, pp. 27-37.
- Agranoff, R. (1996). *Managing Intergovernmental Processes*. Handbook of Public

- Administration. Perry, J.L. Ed. San Fransisco: Jossey-Bass. pp. 210–231.
- Alexiou, C. (2009). Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE). *Journal of Economic and Social Research*, Vol. 11, No. 1. pp 1-16.
- Awan, R.U., Azid, T. and Sher, T. (2011). Growth Implications of Government Expenditures in Pakistan: An Empirical Analysis. *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business Institute Of Interdisciplinary Business Research* 451, Vol. 3, No. 3.
- Baltagi, B. H. (2003). *Econometric Analysis of Panel Data*, Second edition, New York: John Wiley&Son, Ltd, Chicester.
- Bappenas, UNDP. (2007). *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah. Building and Reinventing Decentralized Governance Project*, Version of July 4, 2007.
- Bendavid. V, Avrom. (1991). *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*, fourth edition. Praeger Publisher, New York.
- Bradbury, J. C. and Stephenson, E.F. (2003). Local Government Structure and Public Expenditures. *Public Choice* Vol.115, pp 185-198.
- Chang, W.Y. Chen, Y.A and Kao, M.R. 2008. Social Status, Education and Government Spending in Two-Sector Model of Endogenous Growth. *The Japanese Economic Review* Vol. 59. No. 1
- Damodar Gujarati. (2009). *Basic Econometrics*. Fifth Edition, Mc Graw- Hill, inc. New York.
- Devarajan, S., Swaroop, V. and Zou, H. (1996). The composition of Public Expenditure and Economic growth. *Journal of Monetary Economics*, Vol.37, pp. 313-344.
- Dobson P, Ken, S, and John, R. (2004). *Strategic Management: Issues and Cases*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Donald, L. M. (2008). The impact of government structure on local public Expenditures, *Public Choice*, Vol. 136, pp 457–473.
- Fisher C. R. (1996). *State and Local Public Finance*. United States of America.
- Folster, S. and Henrekson. M. (1998). *Growth and the Public Sector : A Critique of the Critics*. Forthcoming *European Journal of Political Economy*.
- Glasson, J. (1974). *An Introduction to Regional Planning Concepts, Theory and Practice*. Hutchinson & Co (Publishers) Ltd.
- Glasson, J, 1997, *An Introduction to Regional Planning*, London HutchinsonEducational.
- Gregoriou, A. and Ghosh, S. (2009). The Impact of Government Expenditure On Growth: Empirical Evidence From A Heterogeneous Panel. *Bulletin of Economic Research*, Vol. 61, No.1, pp 0307-3378.
- Grossman, P.J. (1988). Government and Economic Growth. A non-linear Relationship. *Public Choice*, Vol. 56, pp.193-200.
- Grossman, P.J. (1992). Fiscal Decentralization and Public Sector Size in Australia. *The Economic Record*, Vol. 68, No.202, pp. 240-6.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Essentials of Econometric*. McGraw Hill International Editions.
- Guseh, J. S. (1997). Government Size and Economic Growth in Developing Countries: A political-economy framework. *Journal of Macroeconomic* Vol.19, pp.175-192.
- Halim, A. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Henry, N. (1995). *Public Administration and Public Affairs*. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice –Hall.
- Kormendi, R. and Meguire.P. (1985). Macroeconomic Determinants of Growth: Cross Country evidence. *Journal of Monetary Economic*, Vol.16, pp. 141-164.
- Lin, J.Y., and Liu, Z. (2000). Fiscal Desentralization and Economic Growth in Cina. *Journal Economic Development and Cultural Change* Chicago, Vol.49, pp 1-21.
- Mankiw, N.G.,D. Romer, dan D.N. Weil. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 107, No. 2, pp.407-37.

- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mello Jr., L.R.D. (2000). Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations: A Cross-Country Analysis. IMF, Washinton, DC.
- Michael, L. M. (1988). Fiscal Decentralization and Government Size. Public Choice Vol.56, No. 3, pp. 259-269.
- Musgrave, R.A. and P.B. Musgrave. (1976). Public Finance in Theory and Practice. edisi kedua, McGraw-Hill Book Co. Inc., Singapore.
- Naganathan, M. and Sivagnanam, K.J. (1999). Federal Transfer and Tax Efforts of States in India. Indian Economic Journal. Vol. 47, No. 4, pp. 101-110.
- Oates, W.E. (1993). Fiscal Federalism and Economic Development. Nasional Tax Journal, Vol.46, No.2, pp. 237-43.
- Oates, W.E. (1995). Comment on Conflict and Dilemmas of Decentralization by Rudolf Holmes. The world Bank Research Observer. Pp 351-353
- Patterson, D.A. (2008). Intergovernmental Cooperation. Albany, NY: New York State Department of State Division of Local Government Services.
- Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
- Rabin J., Hildrent B. W. and Miller J. G. (1996). Budgeting: Formulation and Execution. Carl Vinson Institute Of Government The University Of Georgia.
- Ram, R. (1986). Government Size and Economic Growth: a New Framework and Some Evidence from Cross-section and Time Series Data. American Economic review, Vol. 15, pp. 367-391.
- Ramayandi, A. (2003). Economics Growth and Government Size in Indonesia : Some Lessons for The Local Authorities. Departement of Economics, Padjajaran University : Bandung
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, (www.Indonesia.go.id)
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, Jakarta.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan daerah, Jakarta.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia Undang-Undang No.34/2000 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia No. 18.1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah, Jakarta.
- Republik Indonesia Undang-Undang RI No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Romer, D. (1996). Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill Book Co. Inc., New York.
- Rosen S. H., and Gayer, T. (2001). Public Finance, Eight edition. McGraw Hill, Irwin.
- Rosen, E.D. (1993). Improving Public Sector Productivity: Concept and Practice. London: Sage Publications, International Educational and Professional Publisher.
- Rudra, P. P. (2010). Modelling the nexus between defense spending and economic growth in asean- 5: Evidence from cointegrated panel analysis, African Journal of Political Science and International Relations, Vol. 4, No.8, pp. 297-307.
- Samuelson, P.A. and W.D. Nordhaus. (2005). Economics. Eighteenth Edition. International Edition. Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Tarigan, A. (2010). Dampak Pemekaran Wilayah. Majalah Triwulan Bappenas Edisi 01/Tahun Xvi/2010 Issn 0854-3709.
- Tarigan, R. (2006). Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara, Jakarta.
- Tiebout, C.M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures Author. The Journal of Political Economy, Vol. 64, No. 5, pp. 416-424.